



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023

29 Februari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Jember



DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D.. SUMBER DAYA MANUSIA	4
E. . ISU STRATEGIS	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
D. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	14
A. KERANGKA PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2023	14
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	15
C. REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV. PENUTUP.....	39
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yaitu Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain – Lainnya.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 1(satu) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 99% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 92.648.221.066 dan Belanja Modal sebesar 1% atau sebesar Rp 1.102.069.400

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 81.366.730.470 atau 87 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan adanya pergeseran anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat tentatif dan seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional.
2. Kompetensi SDM tentang sistem kinerja pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen - dokumen kinerja

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Perlu dilakukan upaya- upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang sistem kinerja pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen - dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya pemerintahan yang memadai dengan penerapan SAKIP di instansi pemerintah sehingga tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP

yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian perjanjian kinerja (PK)

3. Perlu meningkatkan Disiplin SDM di Lingkungan Sekretariat DPRD Jember menjadi lebih profesional dan efektif dalam sistem administrasi melalui Rakor – Rakor sebagai upaya Evaluasi Kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun 2023

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dipimpin oleh Sekretaris DPRD
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Jember mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati*)
- (3) Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bagian – bagian guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bagian secara terpadu;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan;
- d. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan;
- e. Penyelenggaraan Analisa kebutuhan barang dan Analisa kebutuhan pemeliharaan barang.
- f. Pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(4) Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jember terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan: Sekretaris DPRD;
2. Unsur Bagian, terdiri dari:
 1. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Kelompok jabatan Fungsional;
 2. Bagian Keuangan dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a) Kelompok jabatan Fungsional;
 3. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 - a) Kelompok jabatan Fungsional;
 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang- Undangan, terdiri dari:
 - a) Kelompok jabatan Fungsional;

D. SUMBER DAYA MANUSIA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember terdiri dari 34 ASN dan 16 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Sekretaris DPRD Kab. Jember	1	
2	Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	
3	Kepala Bagian Umum dan pelaporan	1	
4	Kepala Bagian Persidangan	1	
5	Kepala Bagian Humas & Perundang-undangan	1	
6	Kepala Sub Bagian Umum	1	
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	
8	Perencana Ahli Muda	1	
9	Perisalah Legislatif Ahli Muda	1	
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1	
12	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda	1	
13	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	
14	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	
15	Pengadministrasi Umum	2	
16	Pengemudi	3	
17	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2	
18	Pramu Bakti	1	
19	Pengelola Kepegawaiaan	1	
20	Bendahara	1	
21	Pengolah Data Laporan Kepegawaiaan	1	
22	PENGadministrasi Keuangan	1	
23	Pengadministrasi Rapat	4	
24	Notulis Rapat	2	
25	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	1	
Jumlah		34	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina utama	VI/e	-
2	Pembina utama Madya	IV/d	-
3	Pembina utama Muda	IV/c	1
4	Pembina Tingkat I	IV/b	2
5	Pembina	IV/a	2
6	Penata Tingkat I	III/d	8
7	Penata	III/c	2
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
9	Penata Muda	III/a	5
10	Pengatur Tingkat I	II/d	6
11	Pengatur	II/c	2
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Juru Tingkat I	I/d	1
15	Juru	I/c	-
16	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
17	Juru Muda	I/a	-
	Jumlah		34

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	1	ASN
2	SLTP	1	ASN
3	SMA/STM	12	ASN

4	D3	3	ASN
5	S1	14	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	5	Non ASN
10	D3	-	Non ASN
11	D4	2	Non ASN
12	S1	9	Non ASN
13	S2	-	Non ASN
Jumlah		50	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, yaitu:

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya informasi/dokumentasi/ publikasi & informasi kepada masyarakat atas kinerja DPRD	Tidak terpublikasinya kinerja DPRD	Informasi dan dokumentasi DPRD belum up date secara on line melalui media massa
			Kurangnya fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat sehingga peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kurang optimal
2	Pembahasan ataupun penataan peraturan perundang-undangan yang kurang optimal, baik	Kurang optimalnya Pembahasan ataupun penataan peraturan perundang-undangan	Belum optimalnya perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan program dan kegiatan, anggaran,

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	yang menjadi prioritas/usulan eksekutif maupun legislatif		serta kinerja dengan data yang relevan, andal dan terbarukan
		Kurangnya tenaga ahli	Belum adanya tenaga ahli untuk menjadi narasumber/ mengevaluasi/menelaah/mengkaji aturan atau kebijakan maupun pemikiran untuk pemecahan suatu masalah
		Padatnya kegiatan DPRD	Ketidaktepatan dan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Stategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan ke 1 (satu) yaitu

1)	Misi ke 2	:	Membangun tata kelola pemerintahan yang kodusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
2)	Tujuan	:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3)	Sasaran Strategis	:	Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan PERDA, dan anggaran dalam RPJMD dan RKPD

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**

Tujuan : TERINTEGRASINYA PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA, DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPD

Indikator Tujuan : Tingkat integrasi program kinerja DPRD dalam dokumen RPJMD dan RKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya		Persentase Program Kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	100%				
		Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Persentase Program Kerja DPRD yang tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	100%				
Setelah Perubahan									
	Terintegrasinya Program Kerja Dprd Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, Dan Anggaran Dalam Dokumen Rpjmd Dan Rkpd		Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Doumen RPJMD dan RKPD			100%	100%	100%	100%

		Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD			100%	100%	100%	100%
--	--	---	--	--	--	------	------	------	------

Sumber data : tabel 4.1 pada Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. tahun 2021-2026

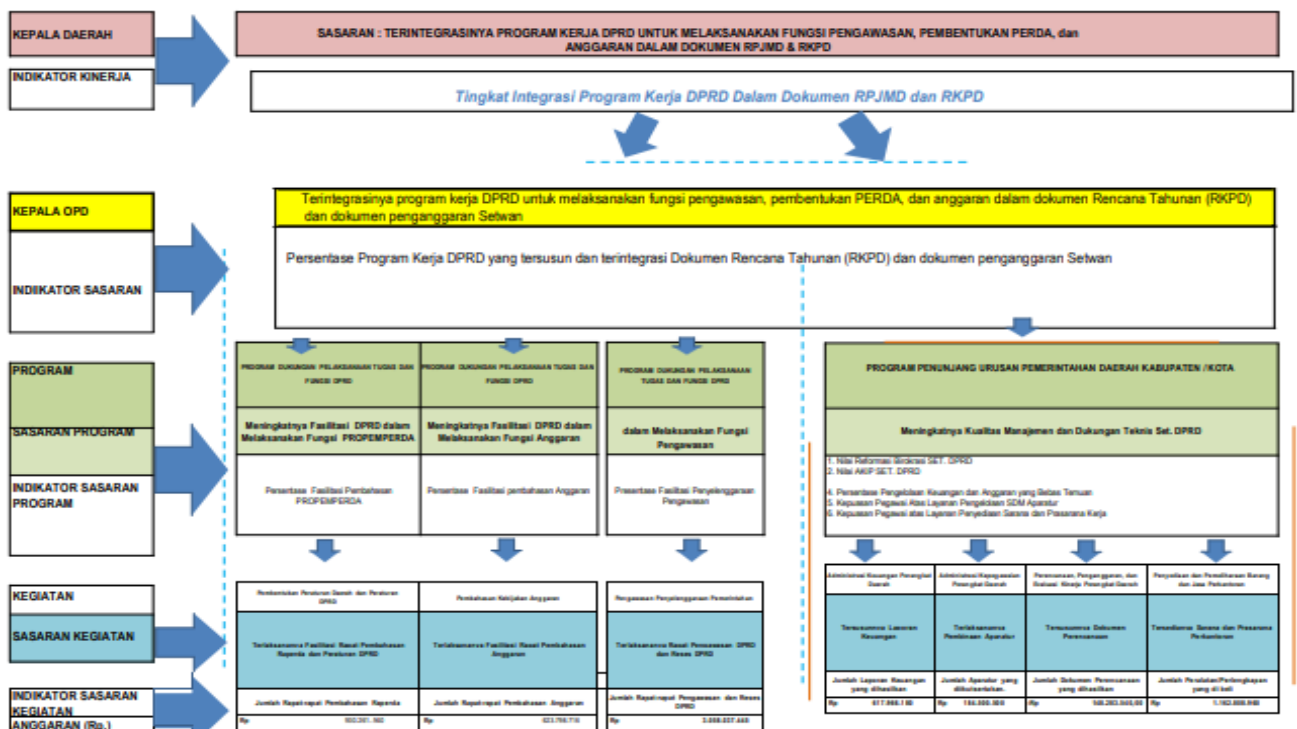
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2023;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program -program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (DPA) _____ x 100% Jumlah kegiatan yang ada dlm RKPD	Sekretaris DPRD	

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun

2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya	Pengintegrasian Program – program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi, Pengawasan dan Pembentukan PERDA, dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100 %

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Jember didukung dengan 2 (dua) anggaran program tahun 2023 yaitu :

1. Anggaran Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tahun 2023 sebesar : Rp. 22.981.423.120
2. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 Rp. 70.768.867.346

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya	Pengintegrasian Program – program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi, Pengawasan dan Pembentukan PERDA, dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan	100 %	100 %	100 %

Sumber Data: Rencana Kerja(renja) dan DPA Sekretariat DPRD tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 1 (satu) indikator sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori Baik Dengan demikian maka secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR SASARAN (2)	TARGET			REALISASI		
		2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya	Pengintegrasian Program – program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi, Pengawasan dan Pembentukan PERDA, dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	-	100 %	100 %	-	100%	100%

Sumber Data: :Rencana Kerja(renja) dan DPA Sekretariat DPRD tahun 2022 dan tahun 2023

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya	Pengintegrasian Program – program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi, Pengawasan dan Pembentukan PERDA, dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%	100%	100%
---	---	--	------	------	------

Sumber Data: RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja(renja) dan DPA Sekretariat DPRD tahun 2022 dan tahun 2023

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya	Pengintegrasian Program – program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi, Pengawasan dan Pembentukan PERDA, dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100	-	

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan table 3.1 pengukuran realisasi kinerja tahun 2023 sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jember rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan
2. Berdasarkan table 3.2 capaian kinerja tahun 2023 yaitu 100% mampu mempertahankan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022, jika dibandingkan pada tahun 2022 dimana capaian kinerja yaitu 100%

3. Berdasarkan Tabel 3.3 capaian kinerja apabila dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2026 telah tercapai. Dimana sejak tahun 2022 telah tercapai sesuai target dan hal tersebut akan dipertahankan pada setiap tahun anggaran. Untuk target nasional tidak disimpulkan realisasinya karena tidak ada realisasi untuk indikator tersebut.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutiv, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya								
Indikator 1.1 Pengintegrasian Program – program DPRD untuk	100%	√						

Melaksanakan Fungsi, Pengawasan dan Pembentukan PERDA, dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam kategori sangat memuaskan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya

Dari table 3.5 diatas, terlihat bahwa evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain – Lainnya 1 (satu) indikator sasaran menunjukkan predikat Sangat Memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100,00%. Faktor pendukung tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain yaitu sebagai berikut :

- Jumlah program kerja DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan pada tahun 2022 sebanyak 2 program dan 15 kegiatan
- Jumlah program kerja DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan pada tahun 2023 sebanyak 2 program dan 15 kegiatan
- Jumlah program kerja DPRD yang masuk dalam renja setwan tahun 2023 sebanyak 2 program 51 sub kegiatan
- Jumlah program kerja DPRD yang masuk dalam DPA setwan tahun 2023 sebanyak 2 program 51 sub kegiatan

Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dalam mewujudkan *keselarasan RKPD dan RPJMD* dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

- Besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan legislatif, badan pengawasan dan anggaran maka diperlukan optimalisasi dalam pendayaan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD

Solusi perbaikan terhadap masalah tersebut :

- Perlu mewujudkan peningkatan pelayanan prima secara cepat dan akurat seperti tersusunnya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel, serta adanya dukungan dari anggota dan pimpinan DPRD

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. pada tahun 2023 didukung 2 (dua) Program 15 (lima belas) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu)Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain – Lainnya

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00	100,00	99,16
	Kegiatan 1 : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 propemperda	1 propemperda	100
	Input : Jumlah dana & Waktu Pelaksanaan			

	Output : Jumlah kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
	Outcome : meningkatnya kualitas Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
	Sub Kegiatan 2 : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 keg	4 keg	100
	Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah dokumen yang disusun			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			
	Sub Kegiatan 3 : Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan /atau Naskah Akademik	2 NA	2 NA	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan /atau Naskah Akademik			
	Outcome : meningkatnya kualitas asilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan /atau Naskah Akademik			
	Kegiatan 2 : Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	Sub Kegiatan 1 : Pembahasan KUA dan PPAS	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah nota kesepakatan KUA dan PPAS			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pembahasan KUA dan PPAS			
	Sub Kegiatan 2 : Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah nota kesepakatan Perubahan KUA & perubahan PPAS			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
	Sub Kegiatan 3 : Pembahasan APBD	1 Perda	1 Perda	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah dokumen Perda APBD			
	Outcome : meningkatnya kualitas pembahasan APBD			
	Sub Kegiatan 4 : Pembahasan APBD Perubahan	1 Perda	1 Perda	100
	Input : Anggaran / Dana	Rp. 127.234.900	Rp. 94.283.750	74,1
	Output : jumlah perda APBD perubahan	1 Perda	1 Perda	100

	Outcome : meningkatnya kualitas Pembahasan APBD Perubahan			
	Sub Kegiatan 5 : Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Perda	1 Perda	100
	Input : jumlah dan waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah laporan pertanggungjawaban APBD			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pertanggungjawaban APBD			
	Kegiatan 3 : Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan			
	Sub Kegiatan1 : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 bln	12 bln	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan			
	Sub Kegiatan 2 : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 bln	12 bln	100
	Input : jumlah dana dan waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan			
	Sub Kegiatan 3 : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 bln	12 bln	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan			
	Sub Kegiatan 4 : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 bln	12 bln	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan			
	Sub Kegiatan 5 : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 bln	12 bln	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			

	Outcome : meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan			
	Sub Kegiatan 6 : Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12 bln	12 bln	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan			
	Sub Kegiatan 7 : Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 bln	12 bln	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan pengawasan penggunaan anggaran			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan			
	Sub Kegiatan 8 : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 keputusan DPRD	1 keputusan DPRD	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan			
	Kegiatan 4 : Peningkatan Kapasitas DPRD			
	Sub kegiatan 1 : Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8 keg	8 keg	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
	Outcome : meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas DPRD			
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	5 ob	5 ob	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli			
	Outcome : meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas DPRD			
	Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7 ob	7 ob	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah tenaga ahli fraksi			
	Outcome : meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas DPRD			

	Sub Kegiatan 4 : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100,00	100,00	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	Outcome : meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas DPRD			
	Sub Kegiatan 5 : Penyusunan Program DPRD	1 program kerja	1 program kerja	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyusunan Program DPRD			
	Outcome : meningkatnya kualitas peningkatan kapasitas DPRD			
	Kegiatan 5 : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Sub Kegiatan 1 : Kunjungan Kerja Dalam Daerah	72 kali	72 kali	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah			
	Outcome : meningkatnya kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Sub Kegiatan 2 : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100,00	100,00	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD			
	Outcome : meningkatnya kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Reses	3 Keg	3 Keg	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan pelaksanaan reses			
	Outcome : meningkatnya kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Kegiatan 6 : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Kode Etik DPRD	100,00	100,00	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan kode etik DPRD			
	Outcome : meningkatnya kualitas pengawasan kode etik DPRD			

	Kegiatan 7 : Fasilitasi Tugas DPRD			
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100,00	100,00	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD			
	Outcome : meningkatnya kualitas fasilitasi tugas DPRD			
2.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	99,68	
	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	100
	Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : Jumlah dokumen yang disusun			
	Outcome : Meningkatnya kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100
	Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : Jumlah dokumen yang disusun			
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100
	Input : jumlah dana yang dibutuhkan & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah dokumen yang disusun			
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Sub Kegiatan 4 : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah dokumen yang disusun			
	Outcome : meningkatnya kualitas penyusunan DPA-SKPD			
	Sub Kegiatan 5 : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah dokumen yang disusun			
	Outcome : meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan DPA-SKPD			

	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 ob	38 ob	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah orang yang dibayar			
	Outcome : meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Admnistrasi Keuangan di Sekretariat DPRD Kab. Jember			
	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah dokumen yang diverifikasi			
	Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Administrasi Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Jember			
	Kegiatan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah dokumen yang disusun			
	Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Jember			
	Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Outcome : meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Outcome : meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan			

	Output : jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Outcome : meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100
	Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Outcome : meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 5 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Outcome : meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Outcome : meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah materai yang dibutuhkan dan jumlah surat kabar yang dibutuhkan			
	Outcome : Meningkatnya kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dan & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Outcome : Meningkatnya kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

	Outcome : Meningkatkan kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Kegiatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit	100
	Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 unit	22 unit	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	100,00	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Outcome : meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Kegiatan 7 : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	Sub Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50 ob	50 ob	100

	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah anggota DPRD yang dibayar Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	Outcome : meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan DPRD			
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	5 paket	5 paket	100
	Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
	Outcome : Outcome : meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan DPRD			
	Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50	46	92
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up			
	Outcome : meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan DPRD			
	Kegiatan 8 : Layanan Administrasi DPRD			
	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 bulan	12 bulan	100
	Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan			
	Output : Prosentase Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
	Outcome : Meningkatnya kualitas Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Berdasarkan Restra DPRD Kabupaten Jember tahun 2023 program kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD memiliki 7 (tujuh) kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan , dimana pada program ini prosentase capaian kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, hal tersebut dikarenakan besaran anggaran yang mencukupi dan didorong dengan kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kab. Jember.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Restra DPRD Kabupaten Jember tahun 2023 program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 8 (delapan) kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, target yang ditetapkan berdasarkan restra Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun 2022 yaitu 100 sementara

prosentase capaian kinerja yang dicapai yaitu 98,58. Pada bagian ini sebagaimana dijelaskan seperti yang disajikan pada tabel 3.6 diatas, terdapat kegiatan yang memang tidak tercapai target kinerja dan adapula yang melebihi target. Untuk kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu pada sub kegiatan medical check up DPRD, salah satu penyebab faktor utamanya adalah dikarenakan 4 (empat) orang anggota DPRD Kabupaten Jember merasa tidak memiliki keluhan terkait kesehatannya.



B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain – Lainnya	100%	87%	Efisien

Sumberdaya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember berjumlah 50 orang dengan rincian 6 pejabat struktural, 7 pejabat fungsional, 21 pelaksana dan 16 tenaga non ASN

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD didukung anggaran sebesar **Rp. 93.750.290.466,- dan terserap sebesar Rp. 81.366.730.470,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dengan rata- rata capaian **87%**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember., pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 93.750.290.466 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 92.648.221.066
2. Belanja Modal sebesar Rp 1.102.069.400

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 2 (dua) program dan 15 (lima belas) kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.768.867.34 6	60.475.318.97 2	85%
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.953.600	35.960.900	34%
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.326.000	14.873.600	46%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.062.600	4.381.600	23%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	17.798.000	10.705.700	60%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.332.500	3.000.000	13%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.434.500	3.000.000	19%
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.290.069.607	4.894.131.421	93%
	Sub Kegiatan:			94%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.737.131.857	4.440.679.971	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	552.937.750	453.451.450	82%
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.844.300	52.043.719	84%
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.844.300	52.043.719	84%
4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.514.704.100	1.119.981.075	74%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.696.200	44.911.825	90%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.345.386.900	1.308.322.400	97%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.040.800	272.917.000	83%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	290.792.500	170.829.250	59%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.852.000	34.764.000	94%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.005.100	390.306.000	69%
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.747.299.910	1.284.472.444	74%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.800.000	37.839.000	58%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	900.918.614	556.277.063	62%

	Air dan Listrik			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	781.581.296	690.356.381	88%
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.124.143.000	1.526.571.235	72%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	710.110.000	530.660.720	75%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.071.000	226.621.640	49%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	710.344.000	612.921.875	86%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.618.000	156.367.000	65%
7	Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32.904.074.02 9	30.916.816.67 8	94%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	32.115.929.02 9	30.243.696.17 8	94%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	613.145.000	519.520.500	85%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	175.000.000	153.600.000	88%
8	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	25.917.709.40 0	19.543.272.10 0	75%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Rapat Koordinasi	25.917.709.40	19.543.272.10	75%

	dan Konsultasi DPRD	0	0	
II	Program : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.981.423.12 0	20.891.411.49 8	91%
1	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	895.282.600	588.638.820	66%
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	62.384.300	20.804.000	33%
	Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	266.521.100	191.439.500	72%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	566.377.200	376.395.320	66%
2	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran	549.850.800	428.031.020	78%
	Sub Kegiatan : Pembahasan KUA dan PPAS	93.390.900	80.026.000	86%
	Sub Kegiatan : Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	69.966.000	48.548.000	69%
	Sub Kegiatan : Pembahasan APBD	167.179.000	132.012.270	79%
	Sub Kegiatan : Pembahasan APBD Perubahan	127.234.900	94.283.750	74%
	Sub Kegiatan : Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	92.080.000	73.161.000	79%
3	Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	689.100.120	531.048.000	77%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	90.156.580	84.475.500	94%
	Sub Kegiatan :	90.156.580	61.593.000	68%

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
	Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	90.160.140	82.094.500	91%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	90.156.580	81.598.000	91%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	71.664.580	62.835.500	88%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	71.664.580	8.778.000	12%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Anggaran	75.349.580	60.270.000	80%
	Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	109.791.500	89.403.500	81%
4	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	1.145.164.700	1.093.177.120	95%
	Sub Kegiatan : Publikasi dan Dokumentasi Dewan	172.790.800	145.117.620	84%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	362.920.000	362.611.000	100 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	426.349.000	425.950.500	100 %
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	164.606.500	154.555.500	94%
	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja DPRD	18.498.400	4.942.500	27%

5	Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.596.039.400	1.262.780.500	79%
	Sub Kegiatan : Kunjungan Kerja dalam Daerah	79.600.000	47.920.000	60%
	Sub Kegiatan : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	64.504.400	32.370.000	50%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses	1.451.935.000	1.182.490.500	81%
6	Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	12.686.200	10.213.500	81%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kode Etik DPRD	12.686.200	10.213.500	81%
7	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD	18.093.299.30 0	16.977.522.53 8	94%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.093.299.30 0	16.977.522.53 8	94%
	JUMLAH	93.750.290.46 6	81.366.730.47 0	87%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2023 sebesar Rp. 81.366.730.470 dari total anggaran Rp. 93.750.290.466 atau 87%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami –kenaikan sebesar 20% yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 71.194.737.385 terealisasi sebesar Rp 65.424.625.079,- atau 91,90%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran serta efektivitas terhadap kebutuhan penunjang tupoksi Sekretariat DPRD Kab. Jember.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 1 (satu) indikator pencapaiannya dalam kategori baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 81.366.730.470 (87%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada—efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi

pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rencana kerja DPRD dan kegiatan – kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif dan seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Tuntutan peningkatan dan ketepatan kualitas pelayanan yang dibutuhkan anggota dan pimpinan DPRD yang cukup tinggi sehingga diperlukan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada
3. Besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan legislatif, badan pengawasan dan anggaran maka diperlukan optimalisasi dalam pendayaan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Adanya koordinasi dan komitmen Pemerintah daerah untuk melaksanakan jadwal Program kegiatan yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
2. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan dan Perundang – undangan.
3. Perlu mewujudkan peningkatan pelayanan prima secara cepat dan akurat seperti tersusunnya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel, serta adanya dukungan dari anggota dan pimpinan DPRD

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Kalimantan No. 86 Telp. (0331)335444-335567 (Fax) JEMBER - 68121

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 175/15/35.09.2/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretariat DPRD ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Sekretariat DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 04 September 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Jember



SUTIYOSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP: 197210051998031014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

- Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- Tugas : Membantu Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD
- Fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
- Tujuan : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD
- Indikator Tujuan : Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program -program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dilaksanakan(D PA)}}{\text{Jumlah kegiatan yang ada dalam RK PD}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Kalimantan No. 86 Telpp. (0331) 335444 – 335567 (Fax.)
JEM B E R - 68121

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTIYOSO, S.H

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBER,


Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.




SUTIYOSO, S.H
NIP. 19721005 199803 1 014

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER**

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 70.768.867.346	P – APBD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 22.981.423.120	P – APBD
Jumlah	Rp. 93.750.290.466	

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 21 November 2023
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBER,

SOTIYOSO, S.H.
NIP. 19721005 199803 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Alamat : Jl.

Kalimantan No. 86 Telp. (0331) 335444 – 335567 (Fax.)
J E M B E R - 68120

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

**Nama OPD/ Unit Kerja : Sekretariat DPRD
RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya	Pengintegrasian Program – program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi, Pengawasan dan Pembentukan PERDA, dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIA			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya	Pengintegrasian Program – program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi, Pengawasan dan Pembentukan PERDA, dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD	Jumlah rapat-rapat/ kegiatan DPRD yang difasilitasi	7 keg	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah rapat Perda yang terfasilitasi	4 keg	1.080.774.600
								Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	8 keg	578.510.800

								Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah rapat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	8 keg	806.531.120
								Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah TA yang tersedia	6 keg	1.262.341.200
								Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah serap aspirasi yang terfasilitasi	75 kali	1.850.055.400
								Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	12 bln	22.736.200
								Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang terfasilitasi	12 bln	15.089.871.300

Jember, 22 November 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBER,



**Matriks Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
Tahun 2021 - 2026**

Tujuan : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya

Sasaran : Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Jember

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember (IKM)

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir restra Periode Tahun 2026	
				2021	Rp	2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Realisasi Anggaran		100%	43.258.631,518	100%	45.670.949,541	100%	48.217.717,809	100%	50.918.146,140	100%	53.782.550,362	100%	56.822.824,487	100%	298.667.419,656
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen	200.900,500	7 Dokumen	216.945,525	7 Dokumen	221.492,801	7 Dokumen	232.567,441	7 Dokumen	244.195,813	7 Dokumen	256.405,604	42 Dokumen	1.366.507,685
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dok	67.502,500	3 dok	70.877,625	3 dok	74.421,506	3 dok	78.142,582	3 dok	82.049,711	3 dok	86.152,196	18 dok	459.146,120
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	32.146,000	1 dok	33.753,300	1 dok	35.440,965	1 dok	37.213,013	1 dok	39.073,664	1 dok	41.027,347	6 dok	218.054,289
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dok	32.746,000	1 dok	34.383,300	1 dok	36.102,465	1 dok	37.907,588	1 dok	39.802,968	1 dok	41.793,116	6 dok	222.725,427
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dok	33.146,000	1 dok	34.803,300	1 dok	36.543,465	1 dok	38.370,638	1 dok	40.289,170	1 dok	42.303,629	6 dok	225.456,202
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dok	35.360,000	1 dok	37.128,000	1 dok	38.984,400	1 dok	40.933,620	1 dok	42.980,301	1 dok	45.129,316	6 dok	240.515,627
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		12 laporan	5.295.730,832	12 laporan	5.798.888,825	12 laporan	6.353.018,983	12 laporan	6.966.213,611	12 laporan	7.626.721,267	12 laporan	8.358.469,875	72 laporan	40.392.898,513
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 ts	4.785.828,932	37 ts	5.264.411,825	38 ts	5.790.853,038	39 ts	6.369.938,338	39 ts	7.006.932,139	39 ts	7.707.625,353	227 ts	36.925.589,566
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dok	509.902,000	12 dok	535.397,100	12 dok	562.166,955	12 dok	590.275,303	12 dok	619.789,068	12 dok	650.778,521	72 dok	3.468.308,947
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		3 laporan	4.537.420,500	3 laporan	4.777.547,625	3 laporan	5.046.424,376	3 laporan	5.347.245,595	3 laporan	5.636.607,875	3 laporan	5.967.128,269	30 laporan	30.936.793,640
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididakan		1 paket	150.085,500	1 paket	157.589,775	1 paket	165.469,264	1 paket	173.742,727	1 paket	182.429,863	1 paket	191.551,350	6 paket	1.020.868,485
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididakan	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididakan		5 paket	2.861.675,000	5 paket	2.794.758,750	5 paket	2.934.496,688	5 paket	3.081.321,522	5 paket	3.235.282,594	5 paket	3.397.048,729	22 paket	18.104.481,285
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dididakan		1 paket	129.478,000	1 paket	135.949,800	1 paket	142.747,290	1 paket	149.884,635	1 paket	157.378,887	1 paket	165.247,822	6 paket	880.684,463
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dididakan		250 dok	85.500,000	260 dok	102.800,000	260 dok	107.730,000	260 dok	113.116,500	260 dok	118.772,325	260 dok	124.710,941	1.750 dok	652.429,766

4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		96 laporan	1,511,094,000	96 laporan	1,586,948,700	96 laporan	1,665,981,135	96 laporan	1,749,293,180	96 laporan	1,836,744,205	96 laporan	1,928,581,415	96 laporan	10,278,329,639
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 laporan	947,170,000	3 laporan	894,528,500	3 laporan	1,044,254,903	3 laporan	1,096,467,671	3 laporan	1,151,239,033	3 laporan	1,208,833,608	3 laporan	6,442,567,759
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	122,570,000	12 laporan	128,898,500	12 laporan	135,133,425	12 laporan	141,890,096	12 laporan	148,984,801	12 laporan	156,433,831	12 laporan	833,710,453
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	490,600,000	12 laporan	515,130,000	12 laporan	540,886,500	12 laporan	567,930,825	12 laporan	596,327,366	12 laporan	626,143,735	12 laporan	3,337,018,426
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	334,000,000	12 laporan	350,700,000	12 laporan	368,235,000	12 laporan	386,646,750	12 laporan	405,979,088	12 laporan	426,278,042	12 laporan	2,271,838,879
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 laporan	6,656,167,658	5 laporan	6,888,913,041	5 laporan	7,338,358,693	5 laporan	7,785,378,638	5 laporan	8,090,548,459	5 laporan	8,495,067,482	5 laporan	41,537,894,808
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8 Unit	559,535,000	8 Unit	587,511,750	8 Unit	616,887,338	8 Unit	647,731,704	8 Unit	680,118,290	8 Unit	714,124,204	8 Unit	749,830,414
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		22 Unit	246,495,000	22 Unit	258,819,750	22 Unit	271,760,738	22 Unit	285,348,774	22 Unit	299,616,213	22 Unit	314,597,024	22 Unit	1,678,637,499
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		50 unit	100,000,000	50 unit	105,000,000	50 unit	110,250,000	50 unit	115,762,500	50 unit	121,550,625	50 unit	127,628,158	300 unit	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit	223,385,500	100 Unit	234,354,775	100 Unit	246,282,514	100 Unit	258,596,639	100 Unit	271,526,471	100 Unit	285,102,795	600 Unit	1,519,448,695
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rahabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Gedung	5,526,692,158	1 Gedung	5,803,026,766	1 Gedung	6,093,178,104	1 Gedung	6,397,837,009	1 Gedung	6,717,728,860	1 Gedung	7,053,615,303	1 Gedung	37,592,078,200
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kerejaksanaan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan dan Kerejaksanaan DPR		3 laporan	24,725,243,928	3 laporan	25,981,596,124	3 laporan	27,259,581,431	3 laporan	28,632,568,582	3 laporan	30,053,688,527	3 laporan	31,556,632,954	18 laporan	168,178,953,466
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		50 orang	23,819,043,928	50 orang	25,009,996,124	50 orang	26,260,495,931	50 orang	27,573,520,727	50 orang	28,952,196,764	50 orang	30,399,806,602	50 orang	162,015,060,075
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		4 paket	756,200,000	4 paket	794,010,000	4 paket	833,710,500	4 paket	875,396,025	4 paket	919,185,820	4 paket	965,124,118	24 paket	5,143,606,469
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up		50 orang	150,000,000	50 orang	157,500,000	50 orang	165,375,000	50 orang	173,643,750	50 orang	182,325,938	50 orang	191,442,234	300 orang	1,020,286,922
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Administrasi dan Fasilitas DPRD		1 laporan	893,048,000	1 laporan	937,798,488	1 laporan	984,585,438	1 laporan	1,033,814,691	1 laporan	1,085,505,428	1 laporan	1,138,788,697	6 laporan	6,074,434,633
4.02.01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		1 laporan	893,048,000	1 laporan	937,798,488	2 laporan	984,585,432	2 laporan	1,033,814,691	2 laporan	1,085,505,426	2 laporan	1,138,788,697	18 laporan	6,074,434,633
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		100%	35,973,983,888	100%	38,476,542,990	100%	40,106,467,220	100%	43,455,875,317	100%	45,185,995,883	100%	47,487,329,978	100%	250,667,314,189
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	DAKSI INDIKATORNYA		2 Sub Kegiatan	3,667,529,000	4 Sub Kegiatan	4,666,287,459	4 Sub Kegiatan	4,343,458,723	2 Sub Kegiatan	4,786,774,359	2 Sub Kegiatan	4,457,904,422	2 Sub Kegiatan	4,988,798,643	22 Sub Kegiatan	26,902,745,595
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1 Propemperda	270,024,000	1 Propemperda	283,525,200	1 Propemperda	297,701,460	1 Propemperda	312,586,533	1 Propemperda	328,215,860	1 Propemperda	344,626,652	6 Propemperda	1,836,679,705
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		4 Kegiatan	2,108,716,000	4 Kegiatan	2,214,151,800	4 Kegiatan	2,324,859,390	4 Kegiatan	2,441,102,360	4 Kegiatan	2,563,157,477	4 Kegiatan	2,691,315,251	24 Kegiatan	14,343,302,378

4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0	0	2 Produk hukum daerah	200,000,000	2 Produk hukum daerah	200,000,000	0	0	0	0	2 Produk hukum daerah	200,000,000	6 Produk hukum daerah yang dikaji	900,000,000
4.02.02.2.01.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Facilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raportas Prakarsa DPRD	1,288,789,000	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raportas Prakarsa DPRD	1,253,228,450	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raportas Prakarsa DPRD	1,420,889,873	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raportas Prakarsa DPRD	1,491,934,366	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raportas Prakarsa DPRD	1,566,531,084	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raportas Prakarsa DPRD	1,644,857,639	20 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raportas Prakarsa DPRD	8,766,230,412
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terlaksananya Tata Tertib DPRD	0	0	1 Peraturan DPRD dg Tata Tertib DPRD	515,382,000	0	0	1 Peraturan DPRD dg Tata Tertib DPRD	541,151,300	0	0	0	0	2 Peraturan DPRD dg Tata Tertib DPRD	1,056,533,100
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	DBS INDIKATORMYA	7 Kebijakan Anggaran	3,428,156,800	8 Kebijakan Anggaran	3,788,972,368	8 Kebijakan Anggaran	4,617,378,793	8 Kebijakan Anggaran	4,258,412,944	8 Kebijakan Anggaran	4,513,917,728	8 Kebijakan Anggaran	4,794,752,784	43 Kebijakan Anggaran	24,792,582,509
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	2 Nota Kesepakatan	664,868,000	2 Nota Kesepakatan	704,760,080	2 Nota Kesepakatan	747,045,685	2 Nota Kesepakatan	791,898,426	2 Nota Kesepakatan	839,330,531	2 Nota Kesepakatan	889,743,363	12 Nota Kesepakatan	4,637,666,085
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Nota Kesepakatan	407,967,000	2 Nota Kesepakatan	432,445,020	2 Nota Kesepakatan	458,391,721	2 Nota Kesepakatan	485,895,224	2 Nota Kesepakatan	515,048,938	2 Nota Kesepakatan	545,951,874	12 Nota Kesepakatan	2,845,699,778
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1 Perda	939,802,000	1 Perda	996,190,120	1 Perda	1,055,961,527	1 Perda	1,119,319,219	1 Perda	1,186,478,372	1 Perda	1,257,667,074	6 Perda	6,555,418,312
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Perda	491,107,000	1 Perda	520,573,420	1 Perda	551,807,825	1 Perda	584,916,295	1 Perda	620,011,272	1 Perda	657,211,949	6 Perda	3,425,627,761
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0	0	1 laporan	156,127,000	1 laporan	165,494,620	1 laporan	175,424,297	1 laporan	185,949,755	1 laporan	197,106,740	5 laporan	880,102,413
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Penanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Penanggungjawaban APBD	1 Perda	924,412,000	1 Perda	979,876,720	1 Perda	1,038,669,323	1 Perda	1,100,969,483	1 Perda	1,167,048,852	1 Perda	1,237,071,783	6 Perda	6,448,068,160
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8 Laporan	5,825,044,800	8 Laporan	6,174,546,648	8 Laporan	6,545,018,438	8 Laporan	6,937,728,605	8 Laporan	7,353,983,849	8 Laporan	7,795,232,871	48 Laporan	40,631,537,396
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 laporan	2,583,870,000	12 laporan	2,736,792,200	12 laporan	2,900,969,132	12 laporan	3,075,048,480	12 laporan	3,259,551,389	12 laporan	3,455,124,472	72 laporan	18,009,365,673
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 laporan	546,642,000	12 laporan	579,440,520	12 laporan	614,206,951	12 laporan	651,059,398	12 laporan	690,122,930	12 laporan	731,530,306	72 laporan	3,812,002,076
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 laporan	586,542,000	12 laporan	621,734,520	12 laporan	659,038,591	12 laporan	698,580,907	12 laporan	740,495,761	12 laporan	784,925,507	72 laporan	4,091,217,286
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 laporan	587,525,400	12 laporan	622,776,924	12 laporan	660,143,536	12 laporan	699,752,152	12 laporan	741,737,281	12 laporan	786,241,518	72 laporan	4,098,176,814
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 laporan	570,250,400	12 laporan	604,571,424	12 laporan	640,845,709	12 laporan	679,296,452	12 laporan	720,054,239	12 laporan	763,257,493	72 laporan	3,978,375,718
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 laporan	353,720,200	1 laporan	374,943,412	1 laporan	397,440,017	1 laporan	421,286,418	1 laporan	446,563,603	1 laporan	473,357,419	6 laporan	2,467,311,068
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 laporan	156,127,000	4 laporan	165,494,620	4 laporan	175,424,297	4 laporan	185,949,755	4 laporan	197,106,740	4 laporan	208,933,145	24 laporan	1,089,035,557

4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Keputusan DPRD	442,267,000	1 Keputusan DPRD	468,803,020	1 Keputusan DPRD	496,921,201	1 Keputusan DPRD	526,747,073	1 Keputusan DPRD	558,351,899	1 Keputusan DPRD	591,853,012	6 Keputusan DPRD	3,084,953,204
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	7 laporan	6,674,495,000	7 laporan	7,668,177,750	7 laporan	7,358,586,638	7 laporan	8,581,446,534	7 laporan	8,254,518,861	7 laporan	8,667,344,804	42 laporan	46,524,429,587
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Orientasi DPRD	0	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	700,000,000	0	0	0	0	1 Kegiatan	700,000,000
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Kegiatan	3,112,582,000	4 Kegiatan	3,268,211,300	4 Kegiatan	3,431,621,655	4 Kegiatan	3,603,202,738	4 Kegiatan	3,783,362,875	4 Kegiatan	3,972,531,018	24 Kegiatan	21,171,511,386
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan Hasil Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8 Kegiatan	1,223,860,000	8 Kegiatan	1,285,053,000	8 Kegiatan	1,349,305,650	9 Kegiatan	1,551,701,408	8 Kegiatan	1,629,286,572	8 Kegiatan	1,710,750,901	49 Kegiatan	8,749,957,621
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 orang	429,944,000	7 orang	461,941,200	7 orang	485,038,260	7 orang	509,290,173	7 orang	534,754,682	7 orang	561,402,416	42 orang	2,992,460,730
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fiskus	Jumlah Orang Tenaga Ahli Fiskus	7 orang	330,444,000	7 orang	346,966,200	7 orang	364,314,510	7 orang	382,530,236	7 orang	401,656,747	7 orang	421,739,585	42 orang	2,247,651,277
4.02.02.2.04.06	Penyelinggihan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen fasilitasi hubungan masyarakat	9 Kag	1,414,920,000	9 Kag	1,485,666,000	9 Kag	1,559,940,300	9 Kag	1,637,946,765	9 Kag	1,719,844,103	9 Kag	1,805,836,308	54 Kag	9,624,162,477
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen Rencana Kerja DPRD	152,705,000	1 Program Kerja DPRD	160,340,250	1 Program Kerja DPRD	168,357,263	1 Program Kerja DPRD	176,775,126	1 Program Kerja DPRD	185,613,882	1 Program Kerja DPRD	194,804,576	6 Program Kerja DPRD	1,038,686,096
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	75 kali	4,926,584,000	75 kali	5,224,298,040	75 kali	5,537,756,982	75 kali	5,876,692,401	75 kali	6,222,222,745	75 kali	6,595,557,170	450	24,378,443,329
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan kunjungan Kerja DPRD	72 kali	625,000,000	72 kali	662,500,000	72 kali	702,250,000	72 kali	744,385,000	72 kali	789,048,100	72 kali	836,390,986	432 kali	4,259,574,086
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Pokir	288,677,000	1 Pokir	305,967,620	1 Pokir	324,357,477	1 Pokir	343,818,926	1 Pokir	364,448,061	1 Pokir	386,314,945	6 Pokir	2,021,614,029
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Revisi	Jumlah Laporan Revisi DPRD yang Disusun	3 laporan	4,034,907,000	3 kali	4,255,801,420	3 kali	4,511,149,505	2 kali	4,791,816,476	3 kali	5,068,727,584	3 kali	5,372,851,239	18 kali	28,005,255,224
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 laporan	856,135,000	1 tahun	377,259,750	1 tahun	386,122,738	1 tahun	415,928,874	1 tahun	4,091,191,318	1 tahun	458,561,584	6 tahun	3,499,199,264
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Peraturan DPRD	490,840,000	0	0	0	0	0	0	2 Peraturan DPRD	564,466,000	0	0	4 Peraturan DPRD	1,055,306,000
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Pengaduan	358,295,000	2 Pengaduan	377,259,750	2 Pengaduan	396,122,738	2 Pengaduan	415,928,874	2 Pengaduan	436,725,318	2 Pengaduan	458,561,584	10 Pengaduan	2,443,893,264
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Penetapan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	212,000,000	2 Dokumen	224,720,000	2 Dokumen	238,203,200	2 Dokumen	252,495,200	2 Dokumen	267,645,110	12 laporan	1,395,063,708
4.02.02.2.07.01	Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Penetapan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Penetapan Kerja Sama Daerah	1 laporan	125,000,000	1 laporan	132,500,000	1 laporan	140,450,000	1 laporan	148,877,000	1 laporan	157,808,620	1 laporan	167,278,197	6 laporan	871,914,817
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Laporan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 laporan	75,000,000	1 laporan	79,500,000	1 laporan	84,270,000	1 laporan	89,328,200	1 laporan	94,585,772	1 laporan	100,380,918	6 laporan	523,148,896
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Alur Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 laporan	18,400,000,000	4 laporan	11,834,886,080	4 laporan	11,685,448,068	4 laporan	12,386,566,468	4 laporan	13,128,788,394	4 laporan	13,917,546,007	24 laporan	72,542,312,791
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 laporan	10,000,000,000	1 laporan	10,000,000,000	1 laporan	11,230,000,000	1 laporan	11,910,900,000	1 laporan	12,828,788,800	1 laporan	13,382,250,776	6 laporan	69,752,385,276
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD	1 laporan	100,000,000	1 laporan	108,000,000	1 laporan	112,800,000	1 laporan	119,120,800	1 laporan	126,247,600	1 laporan	133,822,800	6 laporan	697,511,854
4.02.02.2.08.03	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Tugas Badan Masyarakat	12 laporan	150,000,000	12 laporan	159,000,000	12 laporan	168,540,000	12 laporan	179,652,400	12 laporan	189,371,544	12 laporan	200,733,837	72 laporan	1,046,297,783
4.02.02.2.08.04	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	12 laporan	150,000,000	12 laporan	159,000,000	12 laporan	168,540,000	12 laporan	179,652,400	12 laporan	189,371,544	12 laporan	200,733,837	72 laporan	1,046,297,783
JUMLAH TOTAL				79,229,924,518		84,147,492,531		88,326,184,829		94,373,221,457		98,968,546,045		104,289,354,466		569,334,733,845